

BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Kemiskinan

2.1.1.1. Definisi Kemiskinan dan Jenis Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (kuncoro, 1997). Definisi tersebut menyiratkan tiga pernyataan dasar, yaitu bagaimana mengukur standar hidup; apa yang dimaksud dengan standar hidup minimum; dan indikator sederhana yang bagaimanakah yang mampu mewakili masalah kemiskinan yang begitu rumit.

Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, dan papan) dan tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi), kemiskinan menunjukkan ketidakmampuan dan ketidaktergantungan dalam peran sosial. Definisi lain menurut Hall dan Midgley (2004 :14) kemiskinan adalah kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relative dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

Todaro (2000), mengatakan bahwa ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman „praktis untuk

mewew2emahami pembangunan yang paling hakiki serta erat kaitannya dengan miskin atau tidak seseorang yaitu :

1. Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam hal ini kecukupan bukan hanya menyangkut makanan, melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar yaitu : sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan memunculkan keterbelakangan absolut. Atas dasar itulah bisa dinyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi itu merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan.
2. Jati diri yaitu menjadi manusia seutuhnya. Adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar dan seterusnya. Jati diri tidak semata diukur dengan material, karena hal itu akan menghilangkan jati diri seseorang.
3. Kebebasan dari sikap menghamba yaitu kemampuan untuk memilih. Kebebasan disini diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek material dalam kehidupan.

Ketiga hal pokok ini adalah yang merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap negara melalui pembangunan. Lebih jauh lagi menurut Lutfi memandang kemiskinan dari titik pandang ekonomi, sosial, politik. Dari titik pandang ekonomi, kemiskinan dianggap merupakan masalah dengan alasan:

1. Kemiskinan merupakan cermin dari rendahnya permintaan aggregate, yang akan mengurangi insentif untuk mengembangkan sistem produksi.
2. Kemiskinan berkaitan dengan rasio kapital / tenaga kerja yang rendah yang selanjutnya mengakibatkan produktivitas tenaga kerja rendah.
3. Kemiskinan sering kali mengakibatkan mislokasi sumber daya terutama tenaga kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), secara umum Kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis :

1. Kemiskinan Absolut adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang dan nilai minimum kebutuhan dasar dikenal dengan istilah garis kemiskinan.
2. Kemiskinan relatif adalah suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini dapat di hitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

2.1.1.2. Ciri – Ciri Kemiskinan

Menurut Bank Dunia (World Bank, 2006), ada tiga ciri-ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia :

1. Banyak rumah tangga yang berada digaris kemiskinan nasional, yang setara dengan 1,55 dolar per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan.
2. Ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia.
3. Mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

Sedangkan BPS (1999), mengemukakan ciri-ciri rumah tangga miskin adalah :

1. Sebagian besar rumah tangga miskin hanya mempunyai satu orang pekerja,
2. Sebagian besar tempat tinggal rumah tangga miskin belum memenuhi persyaratan kesehatan yang ada,
3. Sebagian besar memiliki lahan pertanian relatif kecil, tingkat pendidikan kepala rumah tangga sebagian besar masih rendah, rata-rata jam kerja masih rendah jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin, status pekerjaan 70% adalah petani.

Ciri-ciri kemiskinan ada yang berbeda antar wilayah, perbedaan ini terkait dengan kemiskinan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan setempat. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif kalau dikaitkan dengan prinsip desentralisasi dalam upaya meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Karena penyebab dan ciri-ciri kemiskinan tidak sama antar satu daerah dengan daerah lainnya. Maka dalam usaha penanggulangan kemiskinan, perlu digali lebih dahulu untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab kemiskinan di daerah tersebut. Berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut sejumlah program selama ini telah dilakukan pemerintah terutama didasari oleh prospektif ekonomi masyarakat setempat.

2.1.1.3. Penyebab Kemiskinan

Menurut Paul Spicker (2002, *Poverty and the Welfare State : Dispelling the Myths*, A Catalyst Working Paper, London : Catalyst.) penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam empat mazhab:

1. *Individual explanation*, diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri : malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya.
2. *Familial explanation*, akibat faktor keturunan, dimana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.
3. *Subcultural explanation*, akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral masyarakat.

4. *Structural explanation*, menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan perbedaan status dan hak.

Menurut Sharp et al. (Sharp, A.M., Register, C.A., Grimes, P.W. (2000), *Economics of Social Issues 14th edition*, New York: Irwin/McGraw-Hill meliputi :

1. Rendahnya kualitas angkatan kerja.

Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah rendahnya kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja ini bias dilihat dari angka buta huruf. Sebagai contoh Amerika Serikat hanya mempunyai angka buta huruf 1 persen, dibandingkan dengan Ethiopia yang mempunyai angka diatas 50 persen.

2. Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal.

Kepemilikan modal yang sedikit serta rasio antara modal dan tenaga kerja (*Capital-to-labor ratios*) menghasilkan produktivitas yang rendah pada akhirnya menjadi faktor penyebab kemiskinan.

3. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi.

Negara-negara dengan penguasaan teknologi yang rendah mempunyai tingkat produktifitas yang rendah menyebabkan terjadinya pengangguran. Hal ini disebabkan oleh kegagalan dalam mengadaptasi teknik produksi yang lebih modern. Ukuran tingkat penguasaan teknologi yang rendah salah satunya bias dilihat dari penggunaan alat-alat produksi yang masih bersifat tradisional.

4. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Negara miskin sumber daya yang tersedia tidak dipergunakan secara penuh dan efisien. Pada tingkat rumah tangga penggunaan sumber daya biasanya masih bersifat tradisional yang menyebabkan terjadinya inefisiensi.

5. Pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut teori Malthus jumlah penduduk berkembang sesuai deret ukur sedangkan produksi bahan pangan berkembang sesuai deret hitung. Hal ini mengakibatkan kelebihan produk dan kekurangan bahan pangan. Kekurangan bahan pangan merupakan salah satu indikasi terjadinya kemiskinan.

Menurut Kuncoro (2000:107) penyebab kemiskinan sebagai berikut :

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal

2.1.1.4. Ukuran Kemiskinan

Banyak sekali ukuran kemiskinan yang dikemukakan oleh para ahli dengan berdasarkan pendapatan perkapita, kebutuhan kalori minimum, konsumsi beras perkapita. Dari berbagai pendapat tersebut yang paling sering digunakan sebagai patokan dalam kemiskinan adalah ukuran dari Biro Pusat Statistik.

Batas kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2009) yang dikategorikan sebagai penduduk miskin adalah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum. Nilai garis kemiskinan yang digunakan

pada batas garis kemiskinan menurut Biro Pusat Statistik didasarkan kepada kebutuhan kalori minimum perhari yaitu 2100 kalori/hari ditambah dengan kebutuhan non makanan seperti pakaian, pendidikan dan kesehatan disisi lain.

Djoyohadikusumo (2006), menggunakan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita pertahun adalah US dolar 50 untuk pedesaan dan US dolar 75 untuk perkotaan.

Sedangkan kemiskinan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Agraria adalah berdasarkan konsumsi sembilan bahan pokok yang dihitung berdasarkan harga setempat. Standar kebutuhan minimum perorang perbulanan: 100 kg beras, 60 liter minyak tanah, 15 kg ikan asin, 6 kg minyak goreng, 2 m batik kasar dan 4 kg garam. Didaerah perkotaan ada pengelompokan untuk miskin sekali 75 persen dari nilai total konsumsi, miskin 75 persen – 125 persen dari nilai total konsumsi, hampir miskin 125 persen - 200 persen dari nilai total konsumsi.

Bank Dunia (2000) untuk standar internasional memberikan batas garis kemiskinan yang lebih tinggi dari standar-standar lainnya yaitu dengan pendapatan perkapita sebesar US dolar 275 per.tahun atau 2 dollar per hari.

2.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan GDP tanpa memandang apakah kebaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 2010). Menurut Simon Kuznetz dalam Todaro, 2004 Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk

menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuain – penyesuain teknologi, kelembagaan, dan ideology terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut ekonom Klasik, Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Rustiono, 2008:26). Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga :

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi (Sukirno, 2010:266). Persamaannya adalah :

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T) \dots\dots\dots(2.1)$$

ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertambahan barang modal

ΔL = tingkat pertambahan tenaga kerja

ΔT = tingkat pertambahan teknologi

Teori ini juga menjelaskan bahwa pada mulanya pertambahan tenaga kerja akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi (Hariani, 2008: 21).

2.1.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2004) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan data metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi).

1. Metode Langsung

Perhitungan metode langsung ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil perhitungan yang sama (BPS, 2004).

Seperti dikatakan diatas, perhitungan PDRB secara langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut :

a. PDRB menurut Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga perhitungan melalui pendekatan nilai tambah (*value added*).

Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/ sektor ekonomi dengan cara mengurangi biaya anatar dari total produksi bruto sektor atau sbu sektor tersebut. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara.

b. PDRB menurut Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto (BPS, 2004)

c. PDRB menurut Pendekatan Pengeluaran (*Expend Approach*)

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto, perubahan stok dan ekspor netto

di suatu wilayah. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS, 2004)

2. Metode Tidak Langsung atau Metode Alokasi

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain : Nilai Produksi Bruto atau netto setiap sektor/subsector pada wilayah yang dialokasikan ; jumlah produksi fisik; tenaga kerja; penduduk dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsector.

Cara penyajian PDRB menurut BPS, 2004 adalah sebagai berikut :

- a. PDRB atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB, PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan terhadap sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- b. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ketahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga

atas inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

2.1.3. Teori Ketenagakerjaan

Masalah yang sering timbul dalam ketenagakerjaan adalah terjadinya ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja (supply of labor) dan permintaan akan tenaga kerja (demand for labor) pada tingkat upah tertentu. Ketidakseimbangan ini dapat berupa excess supply of labor, yaitu apabila penawaran lebih besar daripada permintaan akan tenaga kerja, atau terjadi excess demand for labor, yaitu apabila terjadi permintaan akan tenaga kerja lebih besar daripada penawaran akan tenaga kerja.

Lewis, A dalam Todaro (1985) mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan, yaitu kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian Negara sedang berkembang, yaitu modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan). Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katub pengaman ketenagakerjaan. Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja di sektor industri (sektor modern) oleh sektor informal, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan

tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga kelebihan penawaran pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak pernah menjadi terlalu banyak.(Todaro, 2004)

2.1.3.1. Pengertian Pengangguran

Secara umum, pengangguran dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labour force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Muana Nanga, 2001). Untuk mengukur pengangguran di dalam suatu Negara biasanya digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran (*unemployment rate*) yaitu jumlah pengangguran yang dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja adalah jumlah seseorang yang bekerja dan tidak bekerja, yang berada dalam kelompok umur tertentu (di Indonesia misalnya, yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas; sedangkan di USA adalah mereka yang berumur antara 15-64 tahun).

2.1.3.2 Klasifikasi Pengangguran

Menurut Muana Nanga (2001) pengangguran dapat dibedakan dalam beberapa jenis, sebagai berikut :

2. Pengangguran Friksional atau Transisi (*frictional or transitional unemployment*)

3. Pengangguran Friksional adalah jenis pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan dalam syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahnya seseorang dari satu daerah ke daerah lainnya.

4. Pengangguran Struktural (*structural unemployment*)

Pengangguran Struktural adalah jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan didalam struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

5. Pengangguran Alamiah (*natural unemployment*)

Pengangguran alamiah adalah tingkat pengangguran yang terjadi pada kesempatan kerja penuh (Sach and Larrain, 1993:456) atau tingkat pengangguran diaman inflasi yang diharapkan (*expected inflation*) sama dengan tingkat inflasi actual (*actual inflation*).

6. Pengangguran Siklis (*cyclical unemployment*)

Pengangguran Siklis adalah pengangguran yang terjadi akibat merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya permintaan efektif aggregate (*effective aggregate demand*) dibandingkan dengan penawaran agregat didalam perekonomian. Oleh karena itulah para ahli ekonomi sering menyebut jenis pengangguran ini sebagai “demand deficient unemployment”.

Sementara itu, Edgar Edwards (Todaro, 1997) membedakan jenis pengangguran atau pendayagunaan tenaga kerja (*underutilization of labour*), kedalam beberapa bentuk sebagai berikut :

1. Pengangguran Terbuka (*open unemployment*)

Yaitu mereka yang benar-benar sedang tidak bekerja, baik secara sukarela (orang-orang yang sebenarnya bias saja memperoleh pekerjaan permanen, namun karena alasan tertentu misalnya karena sudah merasa cukup makmur tanpa bekerja, mereka tidak mau memanfaatkan kesempatan kerja yang ada), maupun karena terpaksa (mereka sesungguhnya sangat ingin bekerja secara permanen namun tidak kunjung mendapatkannya).

2. Setengah Pengangguran (*under employment*)

Yaitu para pekerja yang jumlah jam kerjanya lebih sedikit dari sebenarnya mereka inginkan (sebagian besar bekerja hanya secara harian, mingguan, atau musiman).

3. Mereka yang nampak aktif bekerja namun sebenarnya kurang produktif (*the visibly active but under utilized*)

Yaitu mereka yang tidak digolongkan pengangguran terbuka atau terselubung, namun bekerja dibawah standar produktivitas normal.

4. Mereka yang memang tidak mampu bekerja secara penuh (*the impaired*)

Sebagai contoh misalnya penyandang cacat, sebenarnya ingin bekerja secara penuh namun terbentur pada kondisi fisik yang lemah dan tidak memungkinkan.

5. Mereka yang tidak produktif (*the unproductive*)

Yaitu mereka yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif, akan tetapi mereka tidak memiliki sumber daya komplemen yang memadai untuk menghasilkan output, yang mereka miliki hanya tenaga meskipun mereka sudah bekerja keras hasilnya tetap saja tidak memadai.

2.1.3.3 Perhitungan Tingkat Pengangguran

Penghitungan secara statistik baku mengenai jumlah pekerja maupun tingkat pengangguran banyak sekali digunakan untuk memperkirakan baik tidaknya suatu perekonomian secara makro sangat penting untuk mengetahui bagaimana jumlah total dari pekerja dan pengangguran dihitung, yaitu untuk mengawasi jumlah keduanya sebagai bahan untuk membuat kebijakan publik. Dalam konsep ketenagakerjaan yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang sudah bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk kedalam kategori angkatan kerja adalah yang secara otomatis berpotensi menghasilkan *output* atau pendapatan, baik yang sudah bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan. *Bureau of Labour Statistics* (BLS) mendefinisikan tingkat pengangguran sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja.

$$\text{Tingkat Pengangguran (\%)} = \frac{\text{Penganggur}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100 \dots \dots \dots (2.1)$$

Sementara tingkat pengangguran terbuka adalah persentase dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Rumus untuk mencari tingkat pengangguran terbuka adalah:

Tingkat Pengangguran (%) =

$$\frac{\text{Penganggur Terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100 \dots \dots \dots (2.2)$$

2.1.4. Konsep Pendidikan

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Soekidjo Notoatmodjo 2003:16). Secara etimologi pendidikan berasal dari kata “*educare*” dalam bahasa latin yang bermakna melatih atau mengajarkan. *Educare* berasal dari kata *ex* dan *ducare*, yang berarti memimpin. Jadi pendidikan adalah suatu proses pelatihan dimana terdapat dua subyek yang saling berhubungan, yaitu yang satu memimpin dan yang satunya lagi dipimpin. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tatalaku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan pendidikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tatalaku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. Salah satu indikator kualitas kesejahteraan suatu bangsa,

ditentukan oleh pendidikan, karenanya arah kebijakan pendidikan suatu bangsa menunjukkan arah kesejahteraan yang ingin dicapai bangsa tersebut.

2.1.4.1. Tujuan Pendidikan

UU No 20 Tahun 2003 mendefinisikan tujuan pendidikan sebagai pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Rumusan tersebut sesuai dengan yang digariskan dalam Undang-undang yang menyarankan bahwa pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri sehingga membangun jati dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta memenuhi kebutuhan pembangunan kesejahteraan bangsa.

2.1.4.2. Jalur Pendidikan

Struktur pendidikan tinggi di Indonesia menurut UU No 20 Tahun 2003 terdiri dari 2 jalur pendidikan, yaitu pendidikan akademik (pendidikan sekolah) dan pendidikan profesional (luar sekolah) yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan Akademik (Pendidikan Sekolah)

Pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta

memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Pendidikan akademik diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.

2. Pendidikan Profesional (Luar sekolah)

Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berkesinambungan. Sebagai contoh adalah pendidikan kesetaraan (A, B dan C), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kursus dan lain-lain.

2.1.4.3. Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan adalah Tahap pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik dan tingkat kerumitan bahan pengajaran. Menurut UU No 20 Tahun 2003 jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah; dan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar; pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA),

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan bentuk lain yang sederajat.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan pendidikan tinggi diselenggarakan dengan system terbuka.

2.1.4.4. Pengukuran Pendidikan

Pengukuran dan evaluasi pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting dan "menentukan" dalam dunia pendidikan; di samping kegiatan ini sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Begitu pentingnya kegiatan tersebut maka tidak jarang ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa pengukuran dan evaluasi pendidikan merupakan "puncak" dari proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan.

Pengertian pengukuran (*measurement*) dan evaluasi (*evaluation*) memang saling berkaitan, meskipun keduanya mempunyai makna yang tidak sama. Perbedaan makna istilah pengukuran dan evaluasi dapat dijelaskan seperti berikut ini. Pengukuran: membandingkan hasil atau prestasi terhadap satuan ukuran tertentu, baik satuan ukuran yang bersifat "*standardize*" maupun yang bersifat "*recommended*". Pengukuran ini bersifat kuantitatif dan objektif.

Pengukuran Pendidikan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdiri dari Partisipasi Sekolah, Pendidikan Tertinggi dan Angka Melek Huruf yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi Sekolah

Umumnya, terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Umum (APS). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni (APS) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

2. Pendidikan Tertinggi

Umumnya, terdapat dua ukuran pendidikan tinggi utama yaitu Tingkat Pendidikan Tertinggi (TPT) dan Lamanya Sekolah. Tingkat Pendidikan Tertinggi (TPT) adalah persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Lamanya sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.

3. Angka Huruf Melek

Angka Huruf Melek (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari.

2.1.5. Konsep Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

Istilah kesehatan dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai untuk menyatakan bahwa sesuatu dapat bekerja secara normal. Bahkan benda mati pun seperti kendaraan bermotor atau mesin, jika dapat berfungsi secara normal, maka seringkali oleh pemiliknya dikatakan bahwa kendaraannya dalam kondisi sehat. Kebanyakan orang mengatakan sehat jika badannya merasa segar dan nyaman. Bahkan seorang dokter pun akan menyatakan pasiennya sehat manakala menurut hasil pemeriksaan yang dilakukannya mendapatkan seluruh tubuh pasien berfungsi secara normal. Berikut pengertian beberapa ahli mengenai kesehatan.

Menurut World Health Organization (1974), Kesehatan adalah :

“a state of complete physical, mental, and social well being and not merely the absence of illness or indemnity. (sesuatu keadaan yang sejahtera menyeluruh baik fisik, mental, dan social dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan)”

Kesehatan Menurut Depkes RI

Konsep sehat dan sakit sesungguhnya tidak terlalu mutlak dan universal karena ada faktor-faktor lain di luar kenyataan klinis yang mempengaruhinya terutama faktor sosial budaya. Kedua pengertian saling mempengaruhi dan pengertian yang satu hanya dapat dipahami dalam konteks pengertian yang lain”

Menurut UU No 23 Tahun 1992 kesehatan diartikan sebagai

“keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental dan sosial dan di dalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian integral kesehatan

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UUD 1945 tertulis bahwa salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti berhasil memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketentraman hidup. Sementara itu tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama.

Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain. Definisi yang bahkan lebih sederhana diajukan oleh Larry Green dan para koleganya yang menulis bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk mempermudah adaptasi sukarela terhadap perilaku yang kondusif bagi kesehatan.

Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Akses, Taspen, dan Jamsostek. Golongan masyarakat yang dianggap 'teranaktirikan' dalam hal

jaminan kesehatan adalah mereka dari golongan masyarakat kecil dan pedagang. Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi lebih pelik, berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait beberapa kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari pelayanan kesehatan itu sendiri.

2.1.6. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.1.6.1. Hubungan antara PDRB dengan Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2001) pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota.

Menuru Kuznet (dikutip dari Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. (Hermanto Siregar dan DwiWahyuniarti, 2007).

2.1.6.2. Hubungan antara Pengangguran dengan Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Arsyad (2007) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka.

Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh perhari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin.

Dian Octaviani (2001) mengatakan bahwa sebagian rumah tangga diIndonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atauupah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok

masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

2.1.6.3. Hubungan antara Pendidikan dengan Jumlah Penduduk Miskin

Dedi Supriadi menunjukkan bahwa kemiskinan secara ekonomi mempunyai akibat yang luas terhadap kemiskinan secara fisik, intelektual, sosial dan emosional. Secara fisik anak-anak miskin sering sakit-sakitan, kurang bersemangat, mengantuk dan lusuh. Secara sosial mereka kurang bersahabat, agresif atau sebaliknya pemalu, malas, dan rendah diri. Secara sosial mereka labil dan kurang peka pada kepentingan orang lain. Secara kognitif mereka lemah, kemampuan belajarnya lambat, prakarsanya kurang dan sulit berkonsentrasi (PRISMA No. 5, Mei 2013).

Dengan keadaan yang cukup payah, anak miskin dalam ruang kelas memperoleh pelajaran yang sama, waktu yang sama, pekerjaan rumah yang sama, guru yang sama dan beban yang sama dengan anak-anak kelas menengah ke atas. Homogenitas pendidikan dari metodologi, kurikulum sampai cara penyampaian guru di kelas melahirkan ketimpangan yang cukup menyedihkan. Semua anak ditempatkan dengan kemampuan berfikir sama. J Drost mengingatkan sejak tahun 2004, bahwa kurikulum 2004 hanya cocok bagi 30% siswa yang cerdas.

Anak-anak miskin ini sebelum berangkat ke sekolah membantu orangtuanya untuk mencukupi kebutuhan dan setelah pulang sekolah juga melakukan hal yang sama. Tentu waktu untuk belajar tidak sebanyak mereka yang

berkecukupan ekonominya. Belum lagi kemampuan untuk membeli buku pelajaran, bahan bacaan penambah wawasan, dan berbagai surat kabar yang menyajikan berita terbaru yang sangat membantu menambah pengetahuan serta gizi makanan setiap hari.

Maka secara ekonomi, kondisi anak miskin dalam dunia persekolahan cukup memberikan gambaran bahwa persaingan untuk memperbaiki nasib, titik berangkatnya berbeda. Tentu hasil dari proses yang berbeda tersebut melahirkan produk yang berbeda.

Dalam beberapa penelitian, terdapat temuan angka pengeluaran untuk pendidikan selalu menempati posisi teratas dibanding dengan pengeluaran unsur keperluan lain. Dalam kaitan ini, pandangan masyarakat terhadap pendidikan amat berpengaruh. Pendidikan masih dipandang sebagai institusi yang mampu mengentaskan seseorang dari kemiskinan, ketimpangan dan keterbelakangan (Prasetyo, 2002).

Pembangunan yang kapitalistik menjadikan pendidikan kini bukan lagi kebutuhan sosial bagi semua warga negara, tapi pendidikan menjadi kebutuhan mewah bagi sebagian besar warga negara. Mereka yang banyak dana bisa sekolah sampai puas dan bisa menikmati hidup lebih mapan.

Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Negara berkewajiban menanggung dan mensejahterakan rakyatnya. Namun dalam kenyatannya, negara tidak serta merta berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan dalam pengalaman kita berbangsa, sejak Indonesia merdeka sampai detik ini belum terasa distribusi ekonomi yang merata. Dampak negatif dari pembangunan yang bertumpu pada

pertumbuhan ekonomi, melahirkan petaka kemanusiaan berupa kemiskinan, pengangguran, otoriterianisme, dan represi negara atas rakyatnya.

Lebih celaka lagi, negara melihat warga negaranya tak lebih sekadar angka-angka statistik yang tidak bisa berbuat apa-apa. Negara sebagai kontrak sosial warga negara tidak menempatkan diri sebagai penyelamat atas kemiskinan yang diderita rakyat. Buktinya anggaran pendidikan dari tahun ke tahun terus menurun. Lebih parah lagi, gejala swastanisasi PTN lembaga pendidikan semakin genjar. Subsidi pendidikan setiap tahun diturunkan. Subsidi kesehatan juga mengalami nasib yang sama. Komersialisasi pendidikan telah melahirkan pendidikan sebagai barang dagangan, dengan mekanisme siapa yang kuat membayar dengan biaya yang diinginkan sekolah, dia yang bisa sekolah.

Proses disudutkannya masyarakat, yang berakibat pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran serta rusaknya lingkungan berjalan sudah cukup panjang dan berkelok-kelok. Proyek modernisasi yang dimulai pada tahun 1960-an melahirkan ketimpangan-ketimpangan baru. Dalam bidang ekonomi, negara kita diarahkan menuju negara industri yang memproduksi teknologi tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.

Rupanya pemerintah Orde Baru begitu terpuak oleh kemajuan Dunia Pertama, sehingga semua jalan ditempuh untuk mengejar “ketertinggalannya”. Semangat untuk maju tersebut, tidak mempedulikan kemampuan obyektif, pelestarian lingkungan, hak rakyat, dan budaya masyarakat Indonesia. Bisa dibaca bahwa pendekatan teknokrasi dalam bidang ekonomi tersebut juga berimbas pada

pendidikan yang diarahkan untuk menjadi pabrik tenaga kerja yang melayani kebutuhan industri. Hasilnya, pengangguran meningkat tajam setiap tahun.

Kualitas pendidikan yang rendah berdampak pada terpuruknya kualitas manusia Indonesia. Menurut laporan UNDP tentang Human Development Index (HDI) yang dipublikasikan pada tahun 2010, peringkat pembangunan manusia Indonesia hanya di posisi 109 dari 147 negara anggota PBB. Peringkat ini lebih rendah, sebutlah dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, bahkan untuk beberapa kawasan Afrika seperti Tunisia (101) dan Afrika Selatan (103).

Meskipun pendidikan nasional selama Orde Baru diabdikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi pada kenyataannya pendidikan tidak mampu membawa bangsa ini keluar dari krisis, sebaliknya memperparah krisis. Hal ini, tidak lain karena kualitas output pendidikan nasional tidak mampu melahirkan individu-individu maupun bangsa yang mandiri, sebaliknya justru menjadi tergantung pada bangsa-bangsa lain (Darmaningtyas, 2009).

2.1.6.4. Hubungan antara Kesehatan dengan Jumlah Penduduk Miskin

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni (kiat/art) untuk :

1. Mencegah penyakit
2. Memperpanjang harapan hidup, dan
3. Meningkatkan kesehatan dan efisiensi masyarakat melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk :
 - a. Sanitasi lingkungan
 - b. Pengendalian penyakit menular
 - c. Pendidikan hygiene perseorangan
 - d. Mengorganisir pelayanan media dan perawatan agar dapat dilakukandiagnosis dini dan pengobatan pencegahan,
 - e. Membangun mekanisme sosial, sehingga setiap insan dapat menikmati standar kehidupan yang cukup baik untuk dapat memelihara kesehatan.

Dengan demikian, setiap warga negara dapat menyadari haknya atas kehidupan yang sehat dan panjang (Winslow, 2000). Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya realitas hidup manusia yang sehat, sejahtera dan bahagia (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan).

Ilmu Kesehatan Lingkungan diberi batasan sebagai ilmu yang mempelajari dinamika hubungan interaktif antara kelompok penduduk atau masyarakat dengan segala macam perubahan komponen lingkungan hidup seperti spesies kehidupan, bahan, zat atau kekuatan di sekitar manusia,

yang menimbulkan ancaman, atau berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, serta mencari upaya-upaya pencegahan. (Umar Fahmi Achmadi, 2001).

Kesehatan lingkungan adalah upaya untuk melindungi kesehatan manusia melalui pengelolaan, pengawasan dan pencegahan factor-faktor lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan manusia (Sutomo, 2001). Kesehatan lingkungan adalah ilmu & seni dalam mencapai keseimbangan, keselarasan dan keserasian lingkungan hidup melalui upaya pengembangan budaya perilaku sehat dan pengelolaan lingkungan sehingga dicapai kondisi yang bersih, aman, nyaman, sehat dan sejahtera terhindar dari gangguan penyakit, pencemaran dan kecelakaan, sesuai dengan harkat dan martabat manusia. (Soenhadji, 2004)

Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Akses, Taspen, dan Jamsostek. Golongan masyarakat yang dianggap 'teranaktirikan' dalam hal jaminan kesehatan adalah mereka dari golongan masyarakat kecil dan pedagang. Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi lebih pelik, berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait beberapa kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari pelayanan kesehatan itu sendiri.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Hermato Siregar dan Dwi Wahyu Winarti. Penelitian tersebut mengestimasi faktor – faktor yang memiliki pengaruh signifikan, baik secara simultan maupun parsial terhadap penurunan

jumlah penduduk miskin. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, PDRB, tingkat inflasi, jumlah lulusan tingkat smp, sma, agrishare, industry share, dan dummy krisis. Penulis menggunakan data panel, berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang mampu mengurangi kemiskinan suatu daerah melainkan efek kebawah (*tickle down effect*).

Penelitian yang dilakukan oleh Deny Tisna Amijaya (2010). Penelitian ini menganalisis Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2008-2009. Hasil penelitian diketahui bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2008-2009.

Peneliti juga dilakukan oleh Whisnu Adhi Saputra (2011). Penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM, pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Timur. Penulis menggunakan data panel, hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas (Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran) secara bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Dan nilai R-squared sebesar 0.609 yang berarti sebesar 60,9 persen variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 40 persen dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, dan Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Lupi Riyani (2010). Penelitian tersebut menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah tahun 1991 – 2011. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB, pengangguran, inflasi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 1991 – 2011. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) yaitu untuk mempelajari arah dan besarnya pengaruh dari satu atau lebih variabel yang sering disebut variabel independent terhadap satu atau lebih variabel lain atau variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran dan PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, sedangkan variabel inflasi dan upah minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Penelitian juga dilakukan oleh Durrotul Mahsunah. Penelitian tersebut menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplorasi asosiatif dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran sebagai variabel bebas. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap

kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Peneliti juga dilakukan oleh Anggit Yoga Permana dan Fitri Arianti (2012). Penelitian ini menganalisis pengaruh PDRB, pengangguran, pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2004 – 2009. Penulis menggunakan data time series dan data cross section (pooling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, sedangkan pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

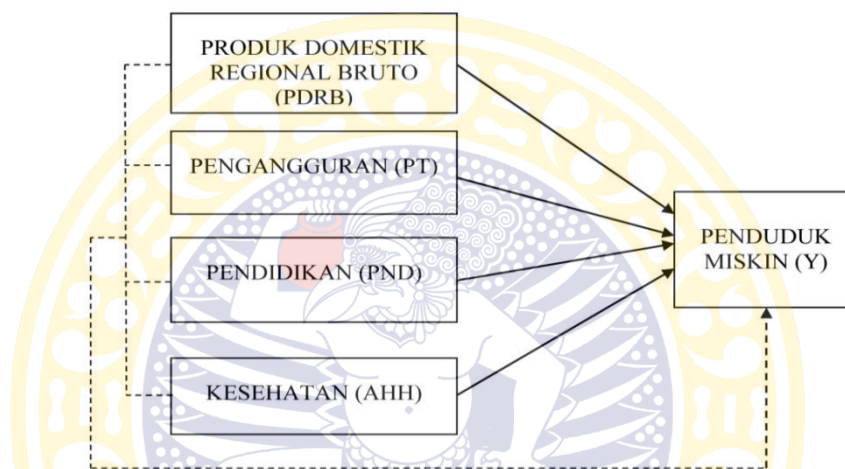
Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Hermanto Siregar dan Dwi Wahyu Winarti (2008)	Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	Penelitian ini menggunakan data panel dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, PDRB, tingkat inflasi, jumlah lulusan tingkat smp, sma, agrishare, industri share, dan dummy krisis. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang mampu mengurangi kemiskinan suatu daerah melainkan efek kebawah (<i>tickle down effect</i>).
Deny Tisna Amijaya (2010)	Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2008-2009	Hasil penelitian diketahui bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2008-2009
Whisnu Adhi Saputra (2011)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Timur	Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variable bebas (Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran) secara bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya

		terhadap tingkat kemiskinan. Dan nilai R-squared sebesar 0.609 yang berarti sebesar 60,9 persen variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 40 persen dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, dan Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur
Lupi Riyani (2010)	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 1991 – 2011	Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemiskinan sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah PDRB, pengangguran, inflasi dan upah minimum. Metode analisis yang digunakan adalah OLS. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pengangguran dan PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan, inflasi dan upah minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 1991 – 2011.
Durrotul Mahsunah	Analisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur	Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
Yoga Permana dan Fitri Arianti (2012)	Analisis pengaruh PDRB, pengangguran, pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2004 – 2009.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, sedangkan pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

Sumber : Hasil Penelitian Terdahulu

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, serta mengacu pada penelitian – penelitian terdahulu yang relevan maka kerangka konseptual dalam penelitian ini tersaji pada Gambar 2.1, sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Kerangka Konseptual Penelitian

2.4. Hipotesis dan Model Analisis

2.4.1. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya masih harus dibuktikan kebenarannya melalui pengujian hipotesis. Sesuai dengan rumusan masalah dalam bab sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah :

1. Secara simultan bahwa PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2012.

2. Secara parsial PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2012.

1.4.2. Model Analisis

Studi ini menggunakan analisis panel data (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program *evIEWS 6*. Data panel atau *pooled data* adalah kombinasi dari data *time series* dan data *cross section*.

Dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section* (*polling*), maka jumlah observasi bertambah secara signifikan tanpa melakukan *treatment* apapun terhadap data, sehingga dalam analisis ini digunakan model pendekatan *fixed effect* (FE). Adapun model persamaan untuk mengestimasi jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Timur dan variabel – variabel yang mempengaruhi seperti PDRB, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas tamatan SMA, dan angka harapan hidup, adalah sebagai berikut :

Model persamaan *fixed effect* :

$$PM_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{1it} + \beta_2 PT_{2it} + \beta_3 PND_{3it} + \beta_4 XHH_{4it} + \mu_{it} \dots\dots\dots(2.3)$$

Keterangan :

PM = Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota i Provinsi Jawa Timur pada tahun t.

PDRB₁ = PDRB atas harga konstan tahun 2000 per Kabupaten/Kota i Provinsi Jawa Timur pada tahun t.

PT₂ = Tingkat Pengangguran per Kabupaten/Kota i Provinsi Jawa Timur pada tahun t.

PND_3 = Tingkat Pendidikan per Kabupaten/Kota i Provinsi Jawa Timur pada tahun t.

AHH_4 = Tingkat Kesehatan per Kabupaten/Kota i provinsi Jawa Timur pada tahun t

α = Konstanta

$\beta_1-\beta_4$ = Koefisien Regresi Variabel Bebas

μ_{it} = *error term*

